

**PELAKSANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH (EKPPD)
(STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013)**

Oleh : Tedi Rizki

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kiprah kepemimpinan Herry Zudianto yang membawa perubahan pada penataan pasar tradisional dan pedangang kaki lima di kawasan Kota Yogyakarta dan sampai saat ini kiprah Walikota yang menjabat Haryadi Suyuti juga telah banyak membawa prestasi-prestasi cemerlang seperti peraihan gelar *Smart City* untuk Kota Yogyakarta, Wajar Tanpa Pengecualian dan MERAIH gelar kinerja pemerintahan terbaik berdasarkan hasil EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) berdasarkan hasil penilaian kemendagri.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari 10 Kota yang mendapat penghargaan dengan kinerja terbaik penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2013 yang di serahkan pada peringatan Hari OTDA tahun 2015. Seiring banyaknya prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kota Yogyakarta seperti “wajar tanpa pengecualian, gelar kota cerdas Indonesia dan kinerja terbaik pada EKPPD Kementrian Dalam Negeri Tahun 2013 membuat peneliti ingin menggali serta mengetahui faktor-faktor apa saja dan indikator yang di jalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih beberapa prestasi dan juga dari paparan latar belakang diatas sejatinya peneliti ingin mengetahui keberhasilan

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih penghargaan sebagai kinerja pemerintahan terbaik dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2013.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) Kota Yogyakarta tahun 2013?

C. Kerangka Teori

1. Konsep Kinerja Pemerintahan

Bernardin dan Russel dalam Yermias T. Keban mengartikan kinerja sebagai the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period.

Sedangkan Suyadi Prawirosentono mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Yermias T. Keban untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut:

- a) Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada

suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut.

- b) Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam system penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan system penilaian kinerja.
- c) Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.
- d) Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi public terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar.

2. Pemerintah Kota

Menurut Mohammad Yamin, yang dikutip oleh Ateng Syafrudin, Pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik.

Pemerintahan ialah tugas kewajiban alat negara. Istilah penguasa dipakai berulang-ulang dan berarti pemerintah yang berkuasa.

Pemerintahan dalam arti luas berarti kewenangan untuk kedamaian dan keamanan, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh sebab itu, sebuah negara harus memiliki kekuasaan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Sebuah Negara juga harus memiliki kekuasaan legislatif, dalam artian kemampuan membuat dan merancang undang-undang. Bukan itu saja, sebuah negara juga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk memenuhi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan.

Asas – asas umum pemerintahan yang baik lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak – hak individu. dalam Pemerintahan Daerah terdapat asas – asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada 3 (tiga) asas dalam pemerintahan daerah, (1) Azas Desentralisasi (2) Azas dekonsentrasi (3) Azas tugas pembantuan.

Selanjutnya mengenai fungsi pemerintahan tersebut kemudian digolongkan menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: (a) Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa public yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. (b) Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

3. Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 tentang kinerja pemerintahan adalah atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Hasil capaian tersebut kemudian didapatkan dari evaluasi kinerja pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam ayat 6 yang kemudian disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja.

Peninjauan lapangan kepada daerah yang berprestasi sangat tinggi atau terbaik dan rendah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Daerah dilakukan penilaian kenyataan dilapangan meliputi : a. Kesejahteraan masyarakat, b. Pelayanan dasar kepada masyarakat, c. Ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan, d. Daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah, e. Manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan, f. Sistem pelayanan perijinan satu atap, g. Sarana dan prasarana jalan, drainase, perekonomian dan perhubungan; dan, h. Sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah.

D. Definisi Oprasional

Definisi oprasional yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- Manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan
- Kesejahteraan masyarakat
- Pelayanan dasar kepada masyarakat
- Daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif menggunakan study kasus (case study). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber pada data dokumen dan naskah dinas dan dokumen perencanaan yang ada pada pemerintah Kota Yogyakarta. Dan sumber data kedua adalah data primer yang berasal dari data wawancara dengan narasumber yang berasal dari pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada tataran pemerintah Kota Yogyakarta beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam hal ini selaku lembaga eksekutif yang menjalankan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta kedalam beberapa program dan kegiatan.

Dan adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis kualitatif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*). Reduksi data yang dimaksud adalah data hasil wawancara

serta dokumentasi yang diperoleh yang kemudian diidentifikasi agar lebih mudah dan focus.

F. Hasil Penelitian

Dalam menjalankan kinerja pemerintahan kota, tentunya pemerintah kota Yogyakarta mempunyai arah dan tujuan kemana tata pemerintahannya akan dibawa. Sehingga untuk menentukan arah kebijakan pemerintah kemudian menjadikan visi dan misi kepada daerah sebagai acuan kinerja yang akan dicapai. Dari visi misi daerah dan kepala daerah ini kemudian dibuatkannya dokumen perencanaan jangka menengah daerah atau yang sering dikenal dengan RPJMD (Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah). Dalam dokumen perencanaan ini dimuatkan sasaran kinerja yang akan dicapai selama jangka waktu 5 (lima) tahun atau satu masa jabatan kepala daerah.

Manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih"* dan juga untuk mencapai tujuan: *"Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas"*. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu: (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, (2) Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal, (3) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta melalui 2 (dua) sasaran strategis yang

ditetapkan yaitu: (1) Terwujudnya Peningkatan kualitas ekonomi Masyarakat dan (2) Terwujudnya Kualitas sosial masyarakat.

Dalam wawancara terbuka disampaikan bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sub bagian pengembangan otonomi daerah bagian tata pemerintahan ibu Dyah Intan Usaratrui, SIP, MA, M.Eng:

“Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemkot tidak saja hanya memberikan bantuan bantuan berupa materil, namun pemkot juga menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari usulan masyarakat. Jadi pembinaan yang dilakukan juga tepat sasaran. Selain itu pemkot juga menggeluntukan Dana hibah kepada masyarakat dalam bentuk kelompok yang sudah dilakukan binaan tersebut”.

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakannya melalui 3 (tiga) sasaran setrategi yang tertuang RPJMD 2012-2016 antara lain yaitu: (1) Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua, (2) Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik, dan (3) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Upaya dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat seperti dalam pendidikan mewajibkan semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan dasar (SD-SMA) dan tidak ada alasan tidak ada biaya karena pemkot telah memberikan proporsi anggaran pendidikan yang besar dan dari fisik telah merehab sekolahsekolagh yang rusak, untuk kesehatan ada puskesmas di Yogyakarta yang

melayani 24 jam dan hari minggu buka serta untuk beberapa puskesmas ada rawat inap , pemkot memiliki rumah pemulihan gizi untuk anak yang kekurangan gizi, pemkot memiliki panti anak untuk menampung anak-anak yang terlantar dan tidak mampu begitu pula panti untuk orang jompo, bagi masyarakat yang mampu pemkot memberikan KMS (Kartu Menuju Sejahtera) yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan keringan biaya sekolah maupun gratis untuk berobat, ada program rumah layak huni yaitu untuk membangun rumah masyarakat yang tidak mampu merehab rumah mereka dan lain-lain.

Daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatannya. Pada tahun 2013 pemerintah Kota Yogyakarta mencantumkan sasaran sebagai upaya dalam meningkatkan aspek daya saing daerah melalui sasaran: (1) Terwujudnya kualitas sumber daya masyarakat yang unggul (2) Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat.

Selain itu sebagai mana yang disampaikan oleh kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah Untuk meningkatkan daya saing dan investasi daerah tentu melalui pembinaan dan promosi serta telah membuka gerai investasi serta mempermudah pelayanan penanaman modal kepada investor asing maupun dalam negeri.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan pada point per point yang peneliti bahas dalam bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah kota Yogyakarta dilihat dari capaian masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan telah tercapai dengan kategori sangat baik. Dalam kinerja tahun 2013

pemerintah kota Yogyakarta memfokuskan kepada pencapaian 4 (empat) misi yaitu:

(1) Manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan

Adapun indicator yang digunakan dalam mencapai keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu: (a) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, (b) Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal, (c) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

(2) Kesejahteraan masyarakat

Adapun indicator yang digunakan dalam mencapai keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu: (a) Pendapatan per kapita (b) Jumlah koperasi aktif (c) Jumlah pelaku UMKM (d) Angka kemiskinan, dan (e) Tingkat intensitas pengendalian frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena SARA dan kesenjangan sosial

(3) Pelayanan dasar kepada masyarakat

Adapun indicator yang digunakan dalam mencapai keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu: (a) Angka Melek huruf (b) Angka partisipasi sekolah (c) Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusif, (d) Indeks kepuasan masyarakat, (e) Presentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat lewat unit pelayanan informasi dan keluhan, (f) Indeks kepuasan layanan rumah sakit (g) Indeks kepuasan layanan kesehatan

(4) Daya saing daerah atau iklim investasi daerah

Adapun indicator yang digunakan dalam mencapai keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu: (a) Indeks pembangunan manusia, (b) Tingkat

kelulusan ujian nasional (c) Angka pengangguran terbuka, (d) Pertumbuhan ekonomi, (e) Inflasi, (f) Pendapatan pajak dan retribusi daerah.

H. SARAN

Setelah melakukan penelitian penelitian dan menemukan berbagai temuan dilapangan, serta berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran terkait “Indikator Kinerja Pemerintah Kota Terbaik Kementrian Dalam Negeri Tahun 2013”, Adapun saran saran yang penulis rekomendasikan sebagai berikut :

1. Institusi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diharapkan Institusi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dapat mengarahkan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini sehingga hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat menjadi data dasar untuk peneliti selanjutnya. Yang dapat direkomendasikan adalah “PELAKSANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD) (STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA 2013)”.

2. Untuk pemerintahan, dalam menjalankan proses perizinan administratif, sebaiknya prosedur, aturan-aturan dan mekanismenya di internal setiap Instansi pemerintahan dipermudah lagi seefisien mungkin. Jangan terlalu banyak prosedur dan aturan

serta laporan yang dibuat untuk menjalankan suatu kegiatan ,sehingga dalam menjalankan suatu program selalu terhambat dalam proses administratif. Ini masih menjadi PR besar untuk semua Instansi pemerintahan di Indonesia. Selain itu, pemerintah kota Yogyakarta terkendala pada beberapa hal lain seperti terbatasnya pada jumlah SDM pelaksana, sehingga ada sebagian capaian kinerja belum tercapai dengan maksimal.